

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Implementasi kebijakan pendidikan sistem ganda pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan Program T-TEP (*Toyota Technical Education Program*) di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi beberapa faktor, antara lain : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, hal inilah yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sistem ganda pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan Program T-TEP (*Toyota Technical Education Program*) di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara apakah sesuai dengan arah kebijakan atau tidak.

#### **1. Komunikasi**

Dari aspek komunikasi yang dilakukan baik komunikasi secara vertikal dan horizontal telah mampu menjadikan pelaksanaan program berjalan seperti yang diharapkan. Komunikasi yang terjalin baik antara sekolah dengan pihak Toyota-Auto 2000 maupun dengan siswa menyebabkan pelaksanaan program tak ada hambatan yang berarti. Berbagai informasi yang telah diberikan pihak sekolah baik melalui Pokja PSG maupun guru pembimbing dalam sosialisasi program, kurikulum bersama dan berbagai aturan tentang PSG telah mampu menumbuhkan pemahaman siswa. Komunikasi melalui proses pembimbingan baik dalam rangka kerja praktik, pelajaran di sekolah maupun pada saat

praktek kerja di Toyota-Auto 2000 menunjukkan bahwa proses komunikasi dengan sasaran kebijakan dapat berjalan seperti yang diharapkan.

## 2. Sumber Daya

Dari sisi sumber daya, pihak sekolah telah menggunakan *resources* yang dimiliki secara optimal. Guru-guru yang ada dan mempunyai latar belakang pendidikan di bidang tehnik kendaraan ringan mendapat penugasan untuk menjadi pembimbing baik dalam praktik di sekolah maupun sebagai pembimbing selama pelaksanaan PSG. Persoalan yang dirasakan dalam kaitan dengan sumber daya adalah keterbatasan subsidi dan fasilitas praktik dari pihak sekolah, sehingga hal ini berdampak pada ketidaknyamanan dalam pelaksanaan PSG. Disamping itu masih adanya siswa yang kurang serius dalam memandang PSG telah menyebabkan pelaksanaan PSG tidak bisa memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Meskipun jumlahnya sedikit, akan tetapi masih ada ditemukan siswa yang menganggap bahwa pelaksanaan PSG itu sebagai sesuatu hal yang dilakukan secara santai saja, sehingga mereka ada yang tidak masuk, membolos dan bahkan tidak memperhatikan selama pelaksanaan PSG. Mereka menganggap pelaksanaan PSG hanya untuk formalitas belaka.

## 3. Disposisi

Dari sisi disposisi/sikap pelaksana, pemahaman program yang baik membawa dampak pada sikap yang diambil oleh pelaksana kebijakan. Pihak sekolah beserta pihak Toyota-Auto 2000 telah menunjukkan komitmen yang tinggi

untuk keberhasilan pelaksanaan PSG. Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak sekolah dan Toyota-Auto 2000 telah mampu menjadikan proses pelaksanaan PSG berjalan seperti yang diharapkan. Sementara itu respon sasaran dan pelaksana kebijakan juga sangat baik. Hampir semua guru yang dilibatkan, baik dalam rangka kegiatan praktek di sekolah maupun sebagai pembimbing secara serius telah melakukan aktivitasnya dengan baik. Dari sisi kepatuhan, para pelaksana yaitu pihak sekolah telah melakukan berbagai tahapan kegiatan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi dan telah dilaksanakannya dengan baik. Sejak masuk ke sekolah para siswa telah diberikan informasi tentang kurikulum sekolah dengan pola pendidikan sistem ganda dengan waktu studi selama 1 tahun. Dari segi keberlangsungan proses pelaksanaan dapat dikatakan bahwa keseluruhan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam kaitan dengan pelaksanaan PSG dapat terealisasi dengan baik, dan output yang dihasilkan pun juga cukup baik.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Dari segi struktur birokrasi, bahwa struktur birokrasi PSG pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan sudah tertata dengan baik dengan adanya Pokja yang secara khusus menangani pelaksanaan PSG dibawah pengawasan kepala sekolah dan dikendalikan wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat dan industri (waka hubin). SOP (Standard Operating Procedure) pelaksanaan PSG mengacu pada Kepmendikbud RI No.323/U/1997 tentang penyelenggaraan PSG pada sekolah menengah kejuruan dengan menggunakan model pembelajaran *block release* dan kurikulum yang *disinkronisasi* pihak

Toyota-Auto 2000. Sedangkan pembagian tugas (fragmentasi) diketahui bahwa pengawasan dan pengelolaan program PSG sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan di tingkat Provinsi dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengelolaan meliputi pengadaan, pendayagunaan, pengembangan peralatan praktik serta pembiayaan penyelenggaraan PSG.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

- 1) Pihak sekolah agar melakukan upaya peningkatan kegiatan sosialisasi dengan materi yang terfokus pada isi kebijakan sehingga sasaran bisa memaksimalkan diri dalam menjalankan kebijakan pendidikan sistem ganda.
- 2) Pihak sekolah hendaknya berupaya untuk selalu memberikan setiap informasi tentang PSG secara terperinci agar implementasi tersebut tidak menimbulkan kebingungan, khususnya pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan Program T-TEP.
- 3) Pihak Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hendaknya memberikan dukungan penuh dalam bentuk penyediaan fasilitas peralatan dan bahan pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara.

- 4) Diperlukan upaya peningkatan pengawasan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pihak sekolah terhadap kebijakan PSG, sehingga pelaksanaan tidak bertentangan dengan isi kebijakan PSG tersebut.
- 5) Pihak sekolah hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan program PSG, dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara Pokja PSG dan pihak Toyota-Auto 2000 sehingga ketika ada temuan permasalahan dilapangan dapat diselesaikan.
- 6) Pihak sekolah agar dalam melaksanakan implementasi kebijakan PSG pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan Program T-TEP lebih meningkatkan dalam hal manajemen pembelajaran, penyiapan peserta didik dan mengembangkan peningkatan jejaring dengan tetap menjaga kerjasama yang baik pada pihak Toyota-Auto 2000.
- 7) Pihak sekolah hendaknya konsekuen memberikan sanksi yang tegas terhadap siswa yang masih melakukan pelanggaran disiplin dan kesalahan. Sanksi ini diharapkan dapat menjadi salahsatu hal yang dapat mengikat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan PSG.